

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODAL KERJA
PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) "SEDIA"
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

**Oleh :
Kadek Surya Febriantari**

Fakultas Ekonomi Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia
e-mail : [febriantari97@yahoo.com/](mailto:febriantari97@yahoo.com) +6285 737288907
Fakultas Ekonomi Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Koperasi sebagai suatu system sosial-ekonomi tidak luput dari permasalahan baik itu masalah manajemen maupun masalah permodalan. Salah satu jenis permodalan yang ada di koperasi adalah modal kerja. Modal kerja selalu dibutuhkan untuk mendanai operasional secara langsung dan kontinyu, sesuai tujuan koperasi yaitu memperoleh keuntungan yang layak dan kontinuitas usaha. Agar pengelolaan usaha koperasi dapat berjalan dengan baik perlu pembinaan dan pengawasan secara efektif dalam penyediaan dan penggunaan modal kerja, dalam arti modal kerja yang tersedia sesuai dengan kapasitas usahanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penggunaan modal kerja pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "SEDIA" Pemda Kabupaten Klungkung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan modal kerja pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "SEDIA" Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)"SEDIA" Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang anggotanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis rasio aktivitas dan rasio rentabilitas modal sendiri periode tahun 2011-2016.

Hasil analisis data berdasarkan analisis rasio dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan modal kerja tahun 2011-2016 jika menggunakan standar Keputusan Menteri Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 menunjukkan rasio aktivitas asset turn over dan perputaran piutang tahun 2011-2016 termasuk kriteria tidak efektif. Sedangkan analisis rasio rentabilitas modal sendiri tahun 2011 dan 2012 dinyatakan kurang efektif dan pada tahun 2013 sampai 2016 dinyatakan efektif. Dengan hasil penelitian tersebut, diharapkan koperasi dapat menetapkan kebijakan baru mengenai ketentuan pembatasan maksimal kredit dan meningkatkan efektivitas penagihan piutang sehingga dapat memperbaiki tingkat perputaran piutang yang rendah.

Kata kunci : *Efektivitas Penggunaan Modal Kerja, Koperasi*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, selanjutnya penjelasan tersebut menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang – perorang dan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi, menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional (Penjelasan pasal 33 UUD 1945).

Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Memperhatikan kedudukan koperasi maka peranan koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Pada masa perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum menampakkan perannya sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945, haruslah diperkuat dan dikembangkan keberadaan koperasi dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi tercapainya masyarakat yang berkeadilan sosial.

KPRI adalah organisasi koperasi sebagai suatu sistem social-ekonomi yang beranggotakan pegawai negeri sipil dengan tujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil menyangkut pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan baik bagi yang bersangkutan maupun bagi keluarganya. Oleh karena itu, agar sasaran kegiatan pokok KPRI tercapai, maka KPRI harus mengadakan usaha-usaha yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya secara efektif.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi primer yang anggotanya para pegawai negeri sipil di Indonesia. KPRI berfungsi sebagai wadah untuk usaha bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Di KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung merupakan salah satu KPRI yang ada di Bali. Ada beberapa masalah yang menyebabkan ketidakefektivitasan antara lain rasio cepat yang menggambarkan kemampuan koperasi membayar hutang jangka pendek dengan uang kas atau secara tunai apabila sewaktu-waktu ditarik dan koperasi KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung belum dapat memenuhi ketentuan akuntansi yang sudah ditetapkan. Keadaan ini juga terjadi pada perputaran modal serta periode perputarannya yang melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas koperasi tersebut.

Oleh karena koperasi mempunyai bidang ekonomi maka diperlukan pengolahan yang baik oleh pengurus sesuai dengan bidang usahanya. Salah

satu permasalahan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan dibidang ekonomi adalah masalah permodalan, manajemen permodalan menyentuh segala fungsi usaha dan keputusan dalam bidang usaha mempunyai hubungan yang sangat erat dengan segi-segi keuangan, sehingga keputusan tersebut salingmendukung.

Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi adalah badan usaha yang kelahirannya dilandasi oleh pikiran sebagai usaha kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal. Oleh karena itu koperasi tidak boleh lepas dari ukuran efektif bagi usahanya, meskipun tujuan utama koperasi adalah berusaha meningkatkan kemakmuran para anggotanya. Dalam rangka mencapai tujuannya tersebut koperasi selalu berjuang untuk dapat bekerja secara efektif, sehingga setiap biaya yang dikeluarkan bidang organisasi harus dapat ditutup oleh penghasilan koperasi perusahaan.(Hendar dkk, 1999:38).Salah satu faktor yang diperhitungkan dalam pengukuran efektivitas koperasi adalah modal kerja, sebab modal kerja adalah modal yang selalu berputar dalam koperasi dan setiap perputaran akan menghasilkan aliran pendapatan (*current income*) yang dapat berguna bagi koperasi.

Salah satu jenis permodalan adalah modal kerja, agar pengelolaan usaha koperasi dapat berjalan dengan baik perlu pembinaan dan pengawasan secara efektif dalam penyediaan dan penggunaan modal kerja. Modal kerja selalu dibutuhkan untuk membelanjai operasional secara langsung dan kontinyu, sesuai tujuan koperasi yaitu memperoleh keuntungan yang layak dan kontinuitas usaha, maka penggunaan modal kerja harus seefektif

mungkin dalam arti modal kerja yang tersedia sesuai dengan kapasitas usahanya.

Pada umumnya modal koperasi berasal dari iuran dari para anggotanya. Namun dalam perkembangannya modal koperasi bisa juga berasal dari pinjaman, baik dari anggota sendiri, diluar anggota seperti perbankan. Salah satu prinsip Koperasi Indonesia Berdasarkan pasal 15 ayat 1 UU No. 25/1992, yaitu kemandirian. Hal ini berarti dalam memenuhi kebutuhan akan modal kerja koperasi seharusnya menggunakan modal dari dalam koperasi atau modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Berikut ini jumlah modal kerja pada KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung periode 2011-2016.

Tabel 1.1 Rincian Kas, Piutang, dan Modal Sendiri KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung Periode 2011-2016

Uraian	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kas	3,945,021	38,793,692	60,517,516	45,507,025	8,326,374	54,468,908
Piutang	3,181,365,993	3,363,925,122	3,948,507,928	4,494,420,280	5,241,740,222	5,929,887,321
- Dana yang dikeluarkan untuk Kredit	2,150,582,550	1,929,583,109	2,749,500,000	2,506,000,000	3,373,000,000	3,748,000,000
Modal Sendiri	1,594,396,392	1,723,581,821	1,958,323,830	2,385,885,878	2,801,093,918	3,286,718,174
- Simpanan Pokok	541,000	564,000	5,720,000	5,790,000	5,928,000	6,380,000
- Simpanan Wajib	1,019,355,741	1,131,178,653	1,336,246,898	1,623,756,937	1,899,146,490	2,219,010,453
- Cadangan	508,781,451	526,120,968	550,638,732	690,620,741	830,301,228	995,609,521
- Donasi/Hibah	65,718,200	65,718,200	65,718,200	65,718,200	65,718,200	65,718,200

Sumber : KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung

Dari tabel 1.1, dapat dilihat pada tahun 2015 dan 2016 selisih antara piutang dengan modal sendiri sangat signifikan. Piutang yang dikeluarkan lebih besar dari modal sendiri yang dimiliki oleh KPRI “SEDIA” Pemda kabupaten Klungkung. Dana yang dikeluarkan untuk kredit pun lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri dimana seharusnya modal sendiri lebih besar dari dana

yang dikeluarkan untuk kredit ataupun lebih besar dari piutang.

Adanya modal kerja yang cukup adalah sangat penting karena dengan modal kerja yang cukup dalam artian modal kerja yang tersedia sesuai dengan kapasitas usahanya, itu memungkinkan bagi koperasi untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan koperasi tidak mengalami kesulitan untuk menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kesulitan keuangan.

Akan tetapi dengan modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi koperasi karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah disia-siakan. Sebaliknya adanya ketidakcukupan dalam modal kerja merupakan sebab utama kegagalan satukoperasi.

Mengingat begitu pentingnya pengelolaan modal kerja bagi suatu koperasi maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini adalah : Analisis Efektivitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “”SEKOP”” Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2016.

METODE PENELITIAN

a. Rasio Aktivitas

Munawir (2002: 240) menyebutkan bahwa, rasio Aktivitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun

pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk dalam rasio aktivitas adalah Assets Turn Over Ratio dan perputaran piutang.

$$ATO = \frac{\text{Volume Usaha}}{\text{Asset}} \times 1 \text{ kali}$$

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh volume usaha atas penggunaan aktiva yang dimiliki.

Penjualan

$$P. \text{ Piutang} = \frac{\text{Penjualan}}{\frac{1}{2} \text{ Saldo Piutang (thn sblmnya + thn ini)}} \times 1 \text{ Kali}$$

Rasio perputaran piutang dihitung berdasarkan penjualan (pendapatan) terhadap piutang rata – rata.

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Munawir (2001:33) menyatakan bahwa “rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimasukan oleh pemilik perusahaan tersebut”. Dalam perhitungan rentabilitas modal sendiri hal ini yang harus dicari ialah besarnya untung bersih dan jumlah modal sendiri. Jadi rumusan dari rentabilitas modal sendiri ialah :

$$\text{Rasio Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan persentase hasil yang telah diperoleh koperasi diukur dari modal sendiri. Dalam perhitungan ini laba yang digunakan adalah laba usaha setelah dikurangi dengan beban bunga dan pajak.

c. Untuk mengukur efektivitas penggunaan modal kerja suatu koperasi dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio yaitu rasio aktivitas dan rasio rentabilitas. Hasil

dari perhitungan rasio tersebut dapat memberi gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu koperasi apabila dibandingkan dengan angka rasio standar. Standar pengukuran efektivitas penggunaan modal kerja suatu koperasi biasanya telah ditetapkan oleh Departemen Koperasi dan PPKM, dimana standar tersebut mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan koperasi di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan standar terbaru yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 dan penulis berusaha menyesuaikannya dengan kriteria standar pengukuran terbaru maupun standar lama.

Tabel 3.1 Standar Pengukuran Efektivitas Penggunaan Modal Kerja

Analisis Rasio Aktivitas		
Rasio	Interval Rasio	Kriteria
1. Asset Trun Over Ratio	≥ 3.5 Kali	Sangat Efektif
	2,5 kali - < 3,5 kali	Efektif
	1,5 Kali - < 2,5 Kali	Cukup Efektif
	1 kali - < 1,5 Kali	Kurang Efektif
	< 1 Kali	Tidak Efektif
2. Perputaran Piutang	> 12 kali	Sangat Efektif
	10 Kali - < 12 Kali	Efektif
	8 Kali - < 10 Kali	Cukup Efektif
	6 Kali - < 8 Kali	Kurang Efektif
	< 6 Kali	Tidak Efektif
Analisis Rasio Rentabilitas		
Rasio	Interval Rasio	Kriteria
1. Rentabilitas Modal Sendiri (Rate Of Return On Net Worth)	$\geq 21\%$	Sangat Efektif
	15 % - < 21 %	Efektif
	9 % - < 15 %	Cukup Efektif
	3 % - < 9 %	Kurang Efektif
	< 3 %	Tidak Efektif

Sumber : Kep.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/2006

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur efektivitas penggunaan modal kerja suatu koperasi dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio yaitu rasio aktivitas dan rasio rentabilitas. Hasil dari perhitungan rasio tersebut dapat memberi gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu koperasi apabila dibandingkan dengan angka rasio standar.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menggunakan dana yang tersedia, yang tercemin dalam perputaran modalnya. Semakin cepat tingkat perputarannya semakin efektif penggunaannya. Untuk mengetahui besarnya tingkat aktivitas KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung periode tahun 2011-2016 digunakan rasio aktivitas sebagai berikut :

Tabel 5.1 Perhitungan ATO KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung

Tahun	Pendapatan	Total Aset	ATO	Kriteria
2011	605.870.684	3.109.505.022	0,19 Kali	Tidak Efektif
2012	683.423.346	3.305.645.617	0,21 Kali	Tidak Efektif
2013	954.044.968	3.909.254.247	0,24 Kali	Tidak Efektif
2014	993.900.209	4.412.199.633	0,22 Kali	Tidak Efektif
2015	1.124.555.611	5.111.281.834	0.22 Kali	Tidak Efektif
2016	1.197.956.736	5.812.369.094	0.21 Kali	Tidak Efektif

Sumber: Lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3

ATO yang dicapai KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung pada tahun 2011 adalah 0,19 kali, tahun 2012 adalah 0,21 kali, tahun 2013 adalah 0,24 kali, tahun 2014 dan 2015 sebanyak 0.22 kali, sedangkan tahun 2016 sebanyak 21 kali. Bila asset turn over dibandingkan dengan standar pengukuran maka asset turn over dari tahun 2011-2016 termasuk dalam kriteria tidak efektif. Dari rincian tersebut dapat diketahui bahwa tingkat perputaran asset turn over yang KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung adalah rendah. Hal ini disebabkan kelebihan dana yang diinvestasikan pada aktiva terutama kelebihan dana yang diinvestasikan pada

piutang. Hal ini disebabkan karena tingginya saldo piutang yang belum tertagih sehingga nilai realisasinya lebih kecil yang mengakibatkan rendahnya tingkat volume usaha atau pendapatan koperasi pada periode itu.

Tabel 5.2 Perhitungan Perputaran Piutang KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung

Tahun	Penjualan	Piutang Rata – Rata	P.Piutang	Kriteria
2011	244.877.622	2.960.035.636,5	0,08 Kali	Tidak Efektif
2012	264.789.300	3.272.645.557,5	0,08 Kali	Tidak Efektif
2013	305.732.950	3.656.216.525,0	0,08 Kali	Tidak Efektif
2014	332.137.960	4.221.464.104,0	0,08 Kali	Tidak Efektif
2015	383.436.470	4.868.080.251,0	0.08 Kali	Tidak Efektif
2016	368.638.150	5.586.646.271,5	0.07 Kali	Tidak Efektif

Sumber : Lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 4

Perputaran piutang digunakan untuk mengetahui kemampuan dana yang tertanam dalam piutang dalam satu periode (1 tahun). Perputaran piutang yang dicapai KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung pada tahun 2011 sampai 2015 adalah 0,08 kali dan tahun 2016 adalah 0,07 kali dalam satu periode. Bila perputaran piutang tersebut dibandingkan dengan standar pengukuran maka perputaran piutang pada tahun 2011 – 2016 termasuk dalam kriteria tidak efektif. Hal ini berarti tingkat perputaran piutang KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung adalah rendah, ini disebabkan karena tingginya saldo piutang yang belum tertagih sehingga nilai realisasinya lebih kecil yang mengakibatkan rendahnya tingkat perputaran piutang.

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri. Untuk mengetahui besarnya tingkat rentabilitas modal sendiri

KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung digunakan rasio rentabilitas modal sendiri sebagai berikut :

Tabel 5.3 Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung

Tahun	SHU Setelah Pajak	Modal Sendiri	Rentabilitas Modal Sendiri	Kriteria
2011	73.040.701	1.594.396.392	4,58%	Kurang Efektif
2012	81.336.733	1.723.581.821	4,72%	Kurang Efektif
2013	359.646.242	1.958.323.830	18,36%	Efektif
2014	347.490.727	2.385.885.878	14,56%	Efektif
2015	440.137.662	2.801.093.918	15,71%	Efektif
2016	510.923.659	3.286.718.174	15,54%	Efektif

Sumber: Lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 5

Rasio rentabilitas dimana pada penelitian ini menggunakan rasio rentabilitas modal sendiri menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dari modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio rentabilitas modal sendiri yang dicapai KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung dari tahun 2011-2016 adalah sebesar 4,58% ; 4,72% ; 18,36 % ; 14,56% ; 15,71% ; dan 15,54%. Pada tahun 2011 dan 2012 jika dibandingkan dengan standar pengukuran maka dinyatakan kurang efektif. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dan 2012 penggunaan modal kerjanya kurang efektif. Pada tahun 2013 rasio meningkat menjadi 18,36% dan bila dibandingkan dengan standar pengukuran maka dinyatakan efektif. Ini dikarenakan peningkatan SHU dari 81.336.733 pada tahun 2012 menjadi 359.656.242 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 rasio mengalami penurunan sebanyak 3,8%. Ini terjadi karena SHU yang mengalami penurunan akibat meningkatnya beban operasional. Tahun 2015 rasio kembali meningkat menjadi 15,71% yang artinya pengurus sudah bisa mengantisipasi peningkatan beban operasional dengan meningkatkan pendapatan koperasi. Dan pada tahun 2016

rasio mengalami sedikit penurunan tetapi masih dalam kategori efektif bila dibandingkan dengan standar pengukuran.

Analisis data

Dari perhitungan rasio yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa tingkat perputaran asset turn over yang dicapai KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung adalah tidak efektif. Hal ini disebabkan kelebihan dana yang diinvestasikan pada aktiva terutama kelebihan dana yang diinvestasikan pada piutang sehingga menyebabkan tingginya saldo piutang yang belum tertagih dan mengakibatkan rendahnya tingkat volume usaha atau pendapatan koperasi pada periode itu. Begitu juga dengan perputaran piutang KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung yang menunjukkan angka tidak efektif. Hal ini juga disebabkan oleh tingginya saldo piutang yang belum tertagih sehingga nilai realisasinya lebih kecil yang mengakibatkan rendahnya tingkat perputaran piutang.

Tingginya saldo piutang disebabkan oleh mudahnya KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung untuk memberikan kredit pada anggotanya. KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung memberikan kredit tanpa agunan untuk anggota yang mencari kredit dibawah Rp 50.000.000,- sedangkan untuk kredit diatas Rp50.000.000,- dan maksimal Rp100.000.000,-menggunakan agunan berupa Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asli. Ini menyebabkan banyak anggota yang ingin mencari kredit terutama untuk kredit dibawah Rp50.000.000,-. Selain itu, cara pembayaran kredit yang mudah dimana para anggota yang mempunyai kredit cukup membayarnya langsung dengan memotong gaji pada bendahara membuat anggota semakin tertarik dalam mencari kredit.

Disamping itu, penyebab tidak efektifnya perputaran asset turn over dan perputaran piutang pada KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung juga disebabkan oleh

pengawasan yang kurang dari para pengawas terutama pengawasan pada pemberian kredit sehingga menyebabkan menumpuknya piutang yang belum tertagih. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara menetapkan kebijakan baru mengenai ketentuan pembatasan maksimal kredit yang diberikan dan ketentuan agunan untuk kredit. Dalam hal ini koperasi dapat mengambil kebijakan dengan lebih selektif dalam pemberian kredit dan penagihan dilakukan secara aktif agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran.

Sedangkan untuk perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri, KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung sudah menunjukkan presentase efektif walau pada tahun 2011 dan 2012 menunjukkan kriteria kurang efektif. Kurang efektif tersebut disebabkan oleh SHU tahun 2011 yang hanya Rp73.040.701,- sedangkan modal sendiri pada tahun 2011 sebesar Rp1.594.396.392,- dan SHU tahun 2012 sebesar Rp81.336.733,- sedangkan modal sendiri pada tahun 2012 sebesar Rp1.723.581.821,-. Jumlah tersebut berbanding jauh dengan SHU tahun 2013 yang meningkat hingga tiga kali lipat dari SHU tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa modal sendiri pada KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung sudah dapat digunakan dengan maksimal.

KESIMPILAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan berdasarkan analisis rasio aktivitas dan rasio rentabilitas pada KPRI “SEDIA” Pemda Kabupaten Klungkung jika dibandingkan dengan dengan standar pengukuran Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006 maka rasio aktivitas menunjukkan bahwa asset turn over dan perputaran piutang tahun 2011-2016 termasuk kriteria tidak efektif. Sedangkan analisis

rasio rentabilitas modal sendiri tahun 2011 dan 2012 dinyatakan kurang efektif dan pada tahun 2013 sampai 2016 dinyatakan efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Perputaran piutang yang rendah dapat diantisipasi dengan cara menetapkan kebijaksanaan baru mengenai ketentuan pembatasan maksimal kredit, agunan untuk kredit yang diberikan kepada anggota dan meningkatkan efektivitas penagihan piutang yang sudah menunggak atau telah jatuh tempo.
- b. Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran, pihak koperasi dapat memberikan sanksi dengan menambah beban bunga atau denda bagi anggota yang terlambat dalam pembayaran kredit. Dengan demikian pihak koperasi dapat mengurangi piutang yang belum tertagih dan dapat lebih mengoptimalkan penggunaan modal kerja dimasa yang akan datang
- c. Para pengawas diharapkan untuk memberikan perhatian yang lebih terutama masalah pemberian dan penagihan piutang sehingga perputaran piutang maupun perputaran asset turn over dapat berjalan dengan efektif.

REFRENSI

- Brigham, Eugene F. dan Joel F Hounston. 2001. *Manajemen Keuangan*. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Djarwanto. 2001. *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2002. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta:BPFE.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Hendar, dkk. 1999. *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE – UI,
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Keown, et, al. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kurniawan, Fendi. 2013. judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Modal Kerja ditinjau dari Rasio Likuiditas, Solvanilitas dan Profitabilitas Pada Koperasi Universitas Bangka Belitung”, *Skripsi Sarjana S1 Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung*. Bangka Belitung.
- Komaruddin. 1991. *Analisis Manajemen Produksi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Munawir, S. 2001. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi kedelapan. Yogyakarta: Liberty.
- Munawir, S. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006
- Prastiwi Widiarti Putri, Airin. Dzukiron AR, Moch. Saifi, Muhammad. 2015. judul “Efektivitas Penggunaan Modal Kerja sebagai Salah Satu Upaya Meningkatkan Likuiditas Studi Kasus pada Perusahaan Otomotif Indomobil Sukses Internasional Tbk”, *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*. Malang.
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keenam. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sutrisno. 2007. *Metode Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Weston, J.Fred & Eugene F Brigham. 1993. *Manajemen Keuangan Jilid I*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Yuliati. Nuraini. Asriati. Syahrudin, Husni. 2015. judul “Efektivitas Penggunaan Modal Kerja Dalam Mengembangkan Usaha di KPRI Tut Wuri Handayani”, *Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan*. Pontianak.